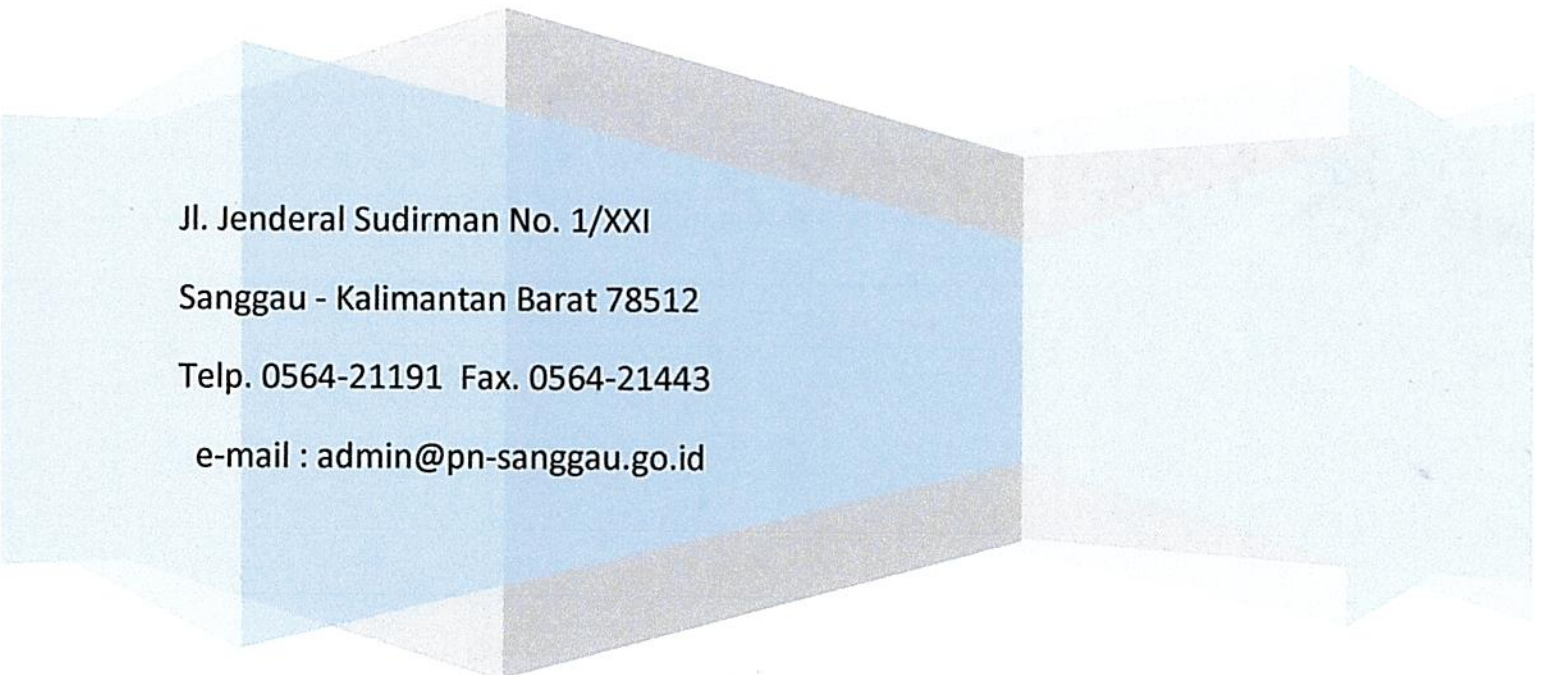


PENGADILAN NEGERI SANGGAU (099245)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2021



Jl. Jenderal Sudirman No. 1/XXI

Sanggau - Kalimantan Barat 78512

Telp. 0564-21191 Fax. 0564-21443

e-mail : admin@pn-sanggau.go.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jenderal Sudirman No. 1/XXI

Telp. 0564-21191 Fax. 0564-21443

Sanggau - Kalimantan Barat 78512

e-mail : admin@pn-sanggau.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sanggau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Sanggau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sanggau, 31 Januari 2022

Sekretaris Pengadilan Negeri Sanggau



Zulkarnain, S. Kom., M. Ak.

NIP. 198507302009041003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	6
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	11
B.1 Pendapatan	
B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Barang	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	13
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Persediaan	
C.3 Uang Muka dari KPPN	
C.4 Ekuitas	
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	14
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2 Beban Persediaan	
D.3 Beban Barang dan Jasa	
D.4 Beban Pemeliharaan	
D.5 Beban Perjalanan Dinas	
D.6 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.7 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.8 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.9 Pos Luar Biasa	
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	16
E.1 Ekuitas Awal	
E.2 Surplus (Defisit) LO	
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5 Transaksi Antar Entitas	
E.6 Ekuitas Akhir	
F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	18
VI. Lampiran Pendukung Laporan Keuangan	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sanggau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sanggau, 31 Januari 2022
Sekretaris Pengadilan Negeri Sanggau



Zulkarnain, S. Kom., M. Ak.
NRP. 198507302009041003

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.549.500 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.549.500 atau mencapai 76,91 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp17.618.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp275.487.200 atau mencapai 99,56 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp276.710.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp16.330.200 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp16.330.200; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp16.330.200

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.549.500 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp267.024.490 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-253.474.990, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-253.474.990.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp1.288.550, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-253.474.990 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 268.516.640 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp16.330.200

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

U R A I A N	Catatan	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	17.618.000	13.549.500	76,91	14.597.500
JUMLAH PENDAPATAN		17.618.000	13.549.500	76,91	14.597.500
BELANJA	B.2				
Belanja Barang	B.2.1	276.710.000	275.487.200	99,56	207.668.400
JUMLAH BELANJA		276.710.000	275.487.200	99,56	207.668.400

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

U R A I A N	Catatan	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Persediaan	C.2	16.330.200	1.288.550
Jumlah Aset Lancar		16.330.200	1.288.550
JUMLAH ASET		16.330.200	1.288.550
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.3	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.4	16.330.200	1.288.550
JUMLAH EKUTAS		16.330.200	1.288.550
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		16.330.200	1.288.550

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	13.549.500	14.597.500
Jumlah Pendapatan		13.549.500	14.597.500
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Persediaan	D.2	80.915.890	65.699.840
Beban Barang dan Jasa	D.3	67.177.600	87.559.500
Beban Pemeliharaan	D.4	621.300	1.104.600
Beban Perjalanan Dinas	D.5	118.309.700	57.860.000
Jumlah Beban		267.024.490	212.223.940
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(253.474.990)	(197.626.440)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.6	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.7	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	-	(9.900)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	(9.900)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(253.474.990)	(197.636.340)
Pos Luar Biasa	D.9		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(253.474.990)	(197.636.340)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	1.288.550	1.520.100
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(253.474.990)	(197.636.340)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.5	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.4.6	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	268.516.640	197.404.790
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		15.041.650	(231.550)
EKUITAS AKHIR	E.6	16.330.200	1.288.550

A. PENJELASAN UMUM

Dasar hukum Entitas
dan Rencana
Strategis

A.1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Visi Pengadilan Negeri Sanggau adalah "MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG" .

Misi Pengadilan Negeri Sanggau adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Sanggau melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan peradilan.
6. Meningkatkan kualitas pengawasan.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sanggau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sanggau. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan

direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya ...
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2021	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	17.618.000	17.618.000
Jumlah Pendapatan	17.618.000	17.618.000
Belanja		
Belanja Barang	276.710.000	276.710.000
Jumlah Belanja	276.710.000	276.710.000

Realisasi Pendapatan
Rp13.549.500

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.549.500 atau mencapai 76,91 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp17.618.000. Pendapatan Pengadilan Negeri Sanggau terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.549.500. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan berkurangnya volume panggilan sidang kepada pihak penggugat setelah diterapkan aturan sidang online dan panggilan secara elektronik kepada para pihak (E-Court). dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	17.618.000	13.549.500	76,91
Jumlah	17.618.000	13.549.500	76,91

Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 7,18 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	13.549.500	14.597.500	(7,18)
Jumlah	13.549.500	14.597.500	(7,18)

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp13.549.500

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing- masing sebesar Rp13.549.500 dan Rp14.597.500. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2021 mengalami penurunan sebesar 7,18 dari TA 2020 Penurunan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya pada periode ini menurun dibanding tahun lalu disebabkan berkurangnya volume panggilan sidang kepada pihak penggugat setelah diterapkan aturan sidang online dan panggilan secara elektronik kepada para pihak (E-Court). Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	13.549.500	14.597.500	(7,18)
Jumlah	13.549.500	14.597.500	(7,18)

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	30.000	-	-
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	770.000	820.000	(6,10)
Pendapatan Ongkos Perkara	3.715.000	2.840.000	30,81
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	9.034.500	10.937.500	(17,40)
Jumlah	13.549.500	14.597.500	(7,18)

Realisasi Belanja
Rp275.487.200

B.2 Belanja

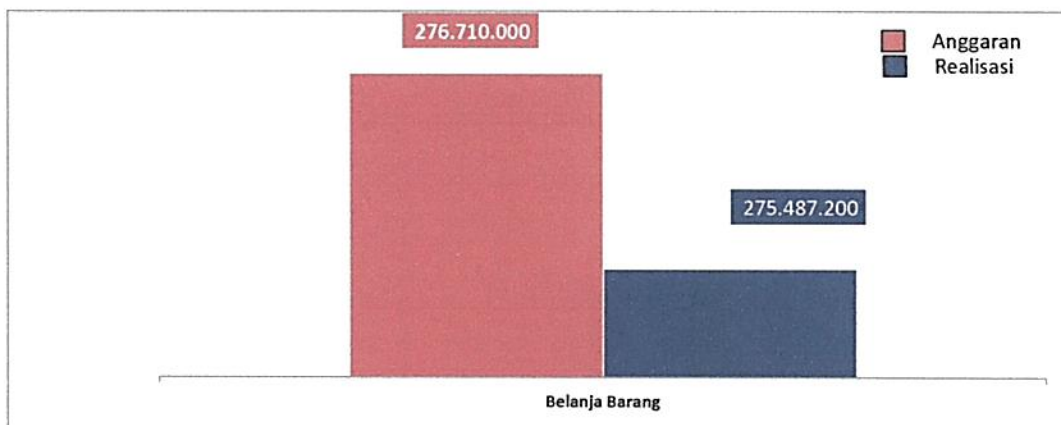
Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp275.487.200 atau 99,56 % dari anggaran belanja sebesar Rp.276.710.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2021

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Barang	276.710.000	275.487.200	99,56
Jumlah	276.710.000	275.487.200	99,56

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2021



Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 32,66% disebabkan peningkatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi optimalisasi Sidang Keliling di Kabupaten Sekadau dan ditambahnya alokasi anggaran untuk panggilan relaas bagi Jurusita/Jurusita Pengganti baik di dalam kota maupun luar kota.. Berikut rincian realisasi belanja TA 2021 dan TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Barang	275.487.200	207.668.400	32,66
Jumlah	275.487.200	207.668.400	32,66

Realisasi Belanja
Barang Rp275.487.200

B.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp275.487.200 dan Rp207.668.400. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 32,66% dari Realisasi TA 2020.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan belanja barang disebabkan peningkatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi optimalisasi Sidang Keliling di Kabupaten Sekadau dan ditambahnya alokasi anggaran untuk panggilan relaas bagi Jurusita/Jurusita Pengganti baik di dalam kota maupun luar kota.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Barang Operasional	866.000	867.000	(0,12)
Belanja Barang Non Operasional	8.711.600	29.092.500	(70,06)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	89.999.900	62.248.900	44,58
Belanja Jasa	57.600.000	57.600.000	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	118.309.700	57.860.000	104,48
Jumlah Belanja Kotor	275.487.200	207.668.400	32,66
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	275.487.200	207.668.400	32,66

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
UP Tunai di Brankas	12.000.000	-
Jumlah	12.000.000	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Pembagian UP secara proporsional yaitu Uang Muka (UP) Tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (60% dari Total UP) dan Uang Muka (UP) KKP sebesar Rp. 8.000.000,- (40% dari Total UP) ;

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp16.330.200 dan Rp1.288.550. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

Jenis	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
Barang Konsumsi	16.330.200	1.288.550
Jumlah	16.330.200	1.288.550

Persediaan tersebut di atas dalam keadaan baik.

C.3 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.4 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp16.330.200. dan Rp1.288.550. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp13.549.500

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp13.549.500 dan Rp14.597.500. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 7,18. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah perkara perdata gugatan maupun permohonan mengalami penurunan pada periode pelaporan ini. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	%
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	30.000	-	-
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah	770.000	820.000,00	(6,10)
Pendapatan Ongkos Perkara	3.715.000	2.840.000,00	30,81
Jumlah	13.549.500,00	14.597.500,00	(7,18)

Beban Persediaan
Rp80.915.890

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp80.915.890 dan Rp65.699.840

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 23,16 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena belanja persediaan konsumsi belum optimal pada periode pelaporan ini. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Persediaan konsumsi	80.915.890	65.699.840	23,16
Jumlah Beban Persediaan	80.915.890,00	65.699.840	23,16

Beban Barang dan Jasa
Rp67.177.600

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp67.177.600 dan Rp87.559.500.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 23,28 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Penurunan beban Barang dan Jasa disebabkan karena realisasi belanja bahan belum optimal pada periode pelaporan ini. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	866.000	867.000	(0,12)
Beban Bahan	8.711.600	29.092.500	(70,06)
Beban Jasa Konsultan	57.600.000	57.600.000	-
Jumlah	67.177.600	87.559.500,00	(23,28)

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp621.300 dan Rp1.104.600.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 43,75 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Penurunan beban pemeliharaan disebabkan karena realisasi belanja pemeliharaan belum optimal pada periode pelaporan ini Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	621.300	1.104.600	(43,75)
Jumlah	621.300	1.104.600	(43,75)

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp118.309.700 dan Rp57.860.000

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 104,48 persen disebabkan oleh meningkatnya perjalanan dinas diluar kota yang dilaksanakan oleh jurusita/Jurusita Pengganti untuk kepentingan penyampaian dokumen relaas dalam perkara pidana. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Perjalanan Biasa	61.959.700	760.000	8.052,59
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	56.350.000	57.100.000	(1,31)
Jumlah	118.309.700,00	57.860.000	104,48

D.6 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

D.7 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

D.8 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp-9.900.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	109.100,00	(100,00)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	(119.000,00)	(100,00)
Jumlah	-	(9.900)	(100,00)

D.9 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp1.288.550,00*

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.288.550,00 dan Rp.1.520.100,00

*Defisit LO Rp.-
253.474.990,00*

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.-253.474.990,00 dan Rp.-197.636.340,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

*Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00*

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari

*Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp0*

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini .

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang..

*Transaksi Antar Entitas
Rp268.516.640*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.268.516.640 dan Rp.197.404.790. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2021

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	275.487.200
Diterima dari Entitas Lain	(13.549.500)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	6.578.940
Jumlah	268.516.640

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DKEL sebesar Rp 275.487.200, sedangkan DDEL sebesar Rp 13.549.500

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0.

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp6.578.940 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Barang Cetakan	Pengadilan Tinggi Pontianak	5.256.630
Atribut	Pengadilan Tinggi Pontianak	1.322.310
Jumlah		6.578.940

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2021.

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.16.330.200,00 dan Rp.1.288.550,00.

*Ekuitas Akhir
Rp16.330.200*

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan periode tahun sebelumnya.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua pada periode pelaporan.

F.2.3. Rekening Pemerintah

A. Daftar Rekening Pemerintah:

1. Rekening Virtual BRI A/C 654440992451000 a.n. "BPG 167 PN SANGGAU" yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0. Persetujuan Perubahan Rekening Satker Lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sesuai surat Kepala KPPN Jakarta VI No: S-153/ WPB.12/ KP.06/ 2021 tertanggal 21 Januari 2021.
2. Bank BTN Cabang Pontianak A/C 00042.01.30.000706.7 a.n. RPL 167 PN SANGGAU UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.219.365.550,-. Persetujuan Pembukaan Rekening Milik Pengadilan Negeri Sanggau sesuai surat Kepala KPPN Sanggau No: S-923/ WPB.17/ KP.03/ 2018 tertanggal 31 Oktober 2018.

B. Penutupan Rekening Pemerintah:

1. Dilakukan Peneutupan Rekening Giro BRI Cabang Sanggau A/C 0322-01-000708-30.1 a.n. "BPG: 167 PN SANGGAU" yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir saat penutupan rekening sebesar Rp.0. Pemindahbukuan dan Penutupan Rekening Lingkup Ditjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I sesuai surat Direktur Pengelolaan Kas Negara No: S-761/PB.3/2021 tertanggal 21 April 2021.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya proses penyelesaian perkara dan Uang Titipan Pihak Ke-3 Lainnya pada periode pelaporan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Kas di Bank	:	Rp.	5.219.365.550,-
- Kas di Brankas	:	Rp.	1.556.000,-
Total saldo	:	Rp.	5.220.921.550,-

Adapun rincian pengelolaan Uang Titipan Pihak Ke-3 per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Rincian Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara :
 - Saldo awal sebesar Rp. 24.040.400,-
 - Penerimaan sebesar Rp. 142.828.500,-
 - Pengeluaran sebesar Rp. 142.191.400,-Sehingga saldo akhir biaya perkara sebesar **Rp. 24.677.500,-**
2. Rincian Biaya Sita Jaminan/Eksekusi/Lelang :
 - Saldo awal sebesar Rp. 2.836.000,-
 - Penerimaan sebesar Rp. 14.450.000,-
 - Pengeluaran sebesar Rp. 12.415.500,-Sehingga saldo akhir biaya perkara sebesar **Rp. 4.870.500,-**

3. Rincian Biaya Konsinyasi :
 - Saldo awal sebesar Rp. 715.037.000,-
 - Penerimaan sebesar Rp. 4.536.172.550,-
 - Pengeluaran sebesar Rp. 59.836.000,-
 Sehingga saldo akhir biaya perkara sebesar **Rp. 5.191.373.550,-**

F.2.5. Revisi DIPA/POK

Informasi mengenai revisi DIPA pada periode pelaporan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- I. Revisi Ke-1 (Kanwil), tanggal 29 Maret 2021.

Jenis Revisi	:	Pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap.
Pagu Awal	:	Rp. 276.710.000
Pagu Akhir	:	Rp. 276.710.000
- II. Revisi Ke-2 (Kanwil), tanggal 29 September 2021.

Jenis Revisi	:	Pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap.
Pagu Awal	:	Rp. 276.710.000
Pagu Akhir	:	Rp. 276.710.000
- III. Revisi Ke-3 (Kanwil), tanggal 24 November 2021.

Jenis Revisi	:	Pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap.
Pagu Awal	:	Rp. 276.710.000
Pagu Akhir	:	Rp. 276.710.000

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Ralat SPM, SSBP, dan SSPB pada periode pelaporan ini.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

- Pada periode pelaporan entitas, telah dilakukan penyesuaian besaran honorarium bagi pejabat pengelola anggaran yang menduduki jabatan fungsional perbendaharaan sebanyak 4 (empat) orang Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2021, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : W17-U6/1628/KU.01/V/2021 tanggal 05 Mei 2021.
- Terdapat pergantian pejabat pengelola anggaran pada tahun anggaran berjalan, yaitu Pejabat Penandatanganan SPM yang semula MILAWATI, SE. menjadi BUDI HARTONO, A. Md., SH., berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : W17-U6/2327/KU.01/VII/2021 terhitung mulai tanggal 01 Juli 2021.

VI.
LAMPIRAN PENDUKUNG
LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.03

VI. Lampiran Pendukung Laporan Keuangan

Daftar Isi

Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2021

LRA Komparatif Satuan Kerja per 31 Desember 2021

LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan per 31 Desember 2021

LRA belanja dan Pengembalian Belanja per 31 Desember 2021

Neraca per 31 Desember 2021

Laporan Operasional per 31 Desember 2021

Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021

Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021

Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2021

Laporan Posisi Persediaan di Neraca per 31 Desember 2021

Laporan Persediaan per 31 Desember 2021

Berita Acara Opname Fisik Persediaan per 31 Desember 2021

Berita Acara Rekonsiliasi Internal per 31 Desember 2021

Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Hasil Rekonsiliasi KPPN per 31 Desember 2021

Daftar Rekening dan Rekening Koran per 31 Desember 2021

Monitoring Penutupan Rekening Kementrian/Lembaga per 31 Desember 2021

Rekapitulasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya Tahun 2021

**KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTERAN**

PERIODE : SEMESTER II TA. 2021

Kode dan Nama UAKPA : (099245) Pengadilan Negeri Sanggau
Kode dan Nama UAPPA-W : (1300) Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat
Kode dan Nama Eselon-1 : (03) Badan Peradilan Umum
Kode dan Nama Kementerian : (005) Mahkamah Agung

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Tidak	Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2. LRA face per 31 Desember 2021	√		Ada
3. Neraca per 31 Desember 2021	√		Ada
4. Laporan Operasional per 31 Desember 2021	√		Ada
5. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021	√		Ada
6. Catatan atas Laporan Keuangan (Format sesuai PMK No. 222/PMK.05/2017)	√		Ada
Lampiran Pendukung LK (Cetakan Aplikasi SAIBA Satker yg Wajib. Bisa Softcopy Pdf)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual per 31 Desember 2021	√		Ada
2. Neraca Percobaan Awal Tahun Anggaran Berjalan	√		Ada
3. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan KPPN/e-Rekon-LK	√		Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	√		Ada
5. Laporan Barang Kuasa Pengguna	√		Ada
6. Berita Acara Stock-Opname Persediaan Sem.I 2021	√		Ada
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan dasar akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca	√		Sama
3. Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
KESESUAIAN DENGAN E-REKON-LK			
Kesesuaian Saldo Awal	Sama	Tidak	Seharusnya
Apakah seluruh akun Neraca Percobaan Awal dari SAIBA 2021 sama dengan Neraca Percobaan Awal dari Aplikasi e-Rekon-LK?	√		Sama
Kesesuaian Saldo 31 Desember 2021	Sama	Tidak	Seharusnya
Apakah seluruh akun Neraca Percobaan bulan Juni dari SAIBA 2021 sama dengan Neraca Percobaan bulan Juni dari Aplikasi e-Rekon-LK?	√		Sama
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
Pengecekan Saldo Tidak Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak
Pengecekan posisi saldo (Debet atau Kredit)	Ya	tidak	Seharusnya
1. Apakah Akun Aset (1xxxxx) bersaldo (D) (kec.Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2. Apakah Akun Penyisihan Piutang (116xxx) bersaldo (K)	N/A		
3. Apakah Akun Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	N/A		
4. Apakah Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5. Apakah Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K) (kec.Pengembalian Pendapatan)	√		Ya
6. Apakah Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxxx) bersaldo (D)	N/A		
7. Apakah Akun Belanja/beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang)	√		Ya

8. Apakah seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	N/A		
Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "YANG BELUM DIREGISTER" (untuk LK Tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
3. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan)		√	Tidak
4. Adakah akun 423319 (Pendapatan Bunga Lainnya) Cat: seharusnya 423221		√	Tidak
5. Adakah akun 423954 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang TAYL)		√	Tidak
6. Adakah akun 423955 (Penerimaan kembali belanja Subsidi TAYL)		√	Tidak
7. Adakah akun 423956 (Penerimaan kembali belanja hibah TAYL)		√	Tidak
8. Adakah akun 423958 (Penerimaan kembali belanja lain-lain TAYL)		√	Tidak
9. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)		√	Tidak
10. Adakah akun 219671 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)		√	Tidak
Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)		√	Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Hibah Langsung	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Jika ada Akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan) maka ada akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) cat: kebalikannya tidak berlaku jika yang belum disahkan seluruhnya hibah langsung bentuk barang/Jasa	N/A		
2. Nilai 111827 lebih kecil atau sama dengan nilai 218211?	N/A		
3. Jika ada Akun 111822 (Kas Lainnya di KL dari Hibah) maka ada akun 391131 (Pengesahan Hibah Langsung), atau kebalikannya. cat: kebalikannya tidak berlaku jika yang belum disahkan seluruhnya hibah langsung bentuk barang/Jasa	N/A		
4. Nilai 111822 lebih kecil atau sama dengan nilai 391131?	N/A		
Transfer Masuk dan Transfer Keluar	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah mungkin ada transfer masuk dan transfer keluar?	N/A		
2. Apakah seharusnya transfer masuk sama dengan transfer keluar?	N/A		
3. Apakah seharusnya transfer masuk lebih besar dari transfer keluar?	N/A		
4. Adakah pengawasan Transfer Keluar dan Transfer Masuk?	N/A		
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?		√	Ya/Tidak
2. Jika ada, mungkinkah Satker ini mendapat Aset dari Perolehan Lainnya?	N/A		
3. Jika ada, Apakah merupakan Jurnal kiriman dari Aplikasi SIMAK-BMN?	N/A		
LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan		√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah seluruh akun di LO bernilai positif?	√		Ya
2. Apakah seluruh akun beban penyisihan piutang bernilai positif?	N/A		
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
11 Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) + Penghapusan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	N/A		

Pengecekan Antar Laporan	Ya	Tidak	Seharusnya
12. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx?	N/A		
Jika tidak ada realisasi akun 526xxx, kemungkinannya kesalahan kode barang persediaan (misal pembelian Materai), atau pembelian tahun lalu yang penyerahan tahun berjalan.			
13. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx?	N/A		
Jika tidak ada realisasi akun 57xxxx, kemungkinannya kesalahan kode barang persediaan (misal menggunakan kode kelompok bansos), atau pembelian tahun lalu yang penyerahan tahun berjalan.			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pos "penyesuaian Nilai Aset"		√	Ada
Bila tidak ada, apakah wajar?			
2. Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ?		√	Tidak
Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP dan Jurnal kiriman dari SIMAK. Uraikan hasil pengecekan dalam lampiran TLK			
Pengecekan akun Transaksi Antar Entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Diterima dari Entitas Lain (313121) atau akun Ditagihkan ke Entitas Lain (313111) dari Jurnal penyesuaian/Jurnal Umum?		√	Tidak
NERACA			
Pengecekan Persamaan Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Sama
2. Kas di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon	√		Sama
3. Kas dan Bank BLU = BAR Rekon	N/A		
4. Kas Lainnya di KL dari Hibah = BAR Rekon	N/A		
Pengecekan Akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "YANG BELUM DIREGISTER" ? (Untuk LK Tahunan Tidak Boleh Ada)		√	Tidak
2. Adakah akun "Pendapatan yang ditangguhkan" ?		√	Tidak
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
Pengecekan Keterkaitan Transaksi untuk mengetahui telah dilakukan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"			
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	N/A		
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	N/A		
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	N/A		
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- Penyesuaian Nilai Aset (di LPE)		√	Ada
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)		√	Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		√	Ada
5. Ada realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
- Ada pendapatan diterima Dimuka (Neraca)		√	Ada/Tidak
6. Ada realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka (Neraca)		√	Ada/Tidak
7. Ada realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar (Neraca)		√	Ada/Tidak

TELAAH KESESUAIAN DENGAN L-BMN

Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA-satker) dengan Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK-satker) untuk:

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Persediaan	√		Sama
2. Aset Tetap	N/A		
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	N/A		
4. Aset Lainnya	N/A		
5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	N/A		

Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna INTRAKOMPTABEL (SIMAK) untuk:

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Akumulasi Penyusutan 137xxx dan 169xxx (SAIBA) dengan SIMAK	N/A		

Semenjak menggunakan basis Akrua, masing-masing Menu baik di Aplikasi Persediaan maupun di Aplikasi SIMAK akan mengirim jurnal yang berbeda ke Aplikasi SAIBA. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan di Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN, apakah input sudah menggunakan menu yang sesuai atau belum. Lihat Menu Buku/Daftar- Daftar Transaksi BMN

	sama	tidak	Seharusnya
- Dari Daftar Transaksi BMN, Apakah Total Nilai Reklas Masuk = Total Nilai Reklas Keluar?	N/A		

Akun-akun tertentu terkait ASET, seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Persediaan/SIMAK. Periksa di Aplikasi SAIBA, Laporan Buku Besar Akrua per Kode Akun, apakah ada transaksi dari JNS DOK: selain SALDO atau JRNBMN

Adakah selain JNS DOK: SALDO atau JRNBMN atas akun-akun dibawah ini?	Ya	Tidak	Seharusnya
Akun 313211 (transfer keluar) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC		√	Tidak
Akun 313221 (transfer masuk) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC		√	Tidak
Akun 391113 (Koreksi Nilai Persediaan)		√	Tidak
Akun 391114 (Revaluasi Aset Tetap)		√	Tidak
Akun 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)		√	Tidak
Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
akun 491421 (Pendapatan Sitaan/Rampasan)		√	Tidak
akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Tidak
Akun 596111 (beban Kerugian Pelepasan Aset)		√	Tidak
Akun 596121 (Kerugian Persediaan Rusak/Usang)		√	Tidak

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Sama	Tidak	Seharusnya
1 Adakah saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2 Ada uraian jenis belanja "tidak ada"		√	Tidak
3 Kesamaan dengan BAR KPPN	√		Sama

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara ADK, Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LK Satker (Neraca Percobaan)	√		Sama
Kecukupan pengungkapan pada CaLK	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah/PMK 222/2015 ?	N/A		
3. Adakah daftar Saldo kas di bendahara Pengeluaran, Hibah Langsung dan BLU?	√		Ya
4. Apakah Format LPE telah sesuai S-5568/PB/2016? (termasuk perbandingan dgn Juni 2020 secara manual) ?	√		Ya
5. Apakah penjelasan LPE telah sesuai S-5568/PB/2016?	Ya		
Pengungkapan Penting Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Jika ada Likuidasi: Apakah perubahan Manajemen telah diungkapkan?	N/A		
2. Adakah pengungkapan lainnya atas pekerjaan kontraktual yang tidak selesai?	N/A		
3. Adakah pengungkapan lainnya atas kasus tuntutan kepada satker di Pengadilan?	N/A		
4. Adakah Pengungkapan lainnya sesuai karakteristik masing-masing Satker?	N/A		

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

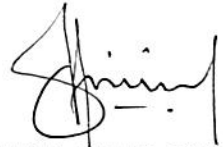
- Tidak terdapat perbedaan dalam telaah laporan keuangan periode Semester II TA. 2021

Mengetahui
Pejabat Penyusun Laporan Keuangan,
Sekretaris



ZULKARNAIN, S. Kom., M. Ak.
NIP. 19850730 200904 1 003

Sanggau, 21 Januari 2022
Penelaah,
Operator SAI



KHAIRIL ANWAR, S.H.
NIP. 19830110 200912 1 005

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROPINSI : 1300 KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : 099245 PENGADILAN NEGERI SANGGAU (03)
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode LK : 16657
Tipe Anggaran : Belanja
Mekanisme : Langsung
Pengad : 030, padata

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA	17,618,000	13,549,500	(4,068,500)	76.91	6,107,000	14,597,500	8,490,500	239.03
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	17,618,000	13,549,500	(4,068,500)	76.91	6,107,000	14,597,500	8,490,500	239.03
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	17,618,000	13,549,500	(4,068,500)	76.91	6,107,000	14,597,500	8,490,500	239.03
B	BELANJA NEGARA								
B.1.1	Rupiah Murni	276,710,000	275,487,200	(1,222,800)	99.56	208,403,000	207,668,400	(734,600)	99.65
B.1.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.b	Belanja Barang	276,710,000	275,487,200	(1,222,800)	99.56	208,403,000	207,668,400	(734,600)	99.65
B.1.1.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	276,710,000	275,487,200	(1,222,800)	99.56	208,403,000	207,668,400	(734,600)	99.65
C	PEMBIAYAAN								
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : 099245 PENGADILAN NEGERI SANGGAU (03)
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRAST
Tanggal : Sabtu, 05 Februari
Halaman : 2
Prog.id : lu_pnakt

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Sanggau, 31 Desember 2021

Sekretaris


 Zulkaifan S. Kom., M. Ak...
 NIP. 198507302009041003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROPINSI : 1300 KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : 099245 PENGADILAN NEGERI SANGGAU (03)
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Sabtu, 05 Februari
 Halaman : 1
 Prog.id : lu_lrbstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	TRANSAKSI KAS								
0	RUPIAH MURNI								
03	RM								
04	KETERTIBAN DAN KEAMANAN								
BF	PERADILAN								
1049	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
BCA	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum								
52	Perkara Hukum Perseorangan								
5211	BELANJA BARANG								
521114	Belanja Barang Operasional	1,550,000	1,550,000	866,000	866,000	0	866,000	55.87	684,000
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,550,000	1,550,000	866,000	866,000	0	866,000	55.87	684,000
5212	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211								
	Belanja Barang Non Operasional	43,660,000	9,160,000	8,711,600	8,711,600	0	8,711,600	95.10	448,400
521211	Belanja Bahan	43,660,000	9,160,000	8,711,600	8,711,600	0	8,711,600	95.10	448,400
5212	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212								
	Belanja Barang Persediaan	49,500,000	90,000,000	89,999,900	89,999,900	0	89,999,900	100.00	100
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	49,500,000	90,000,000	89,999,900	89,999,900	0	89,999,900	100.00	100
5218	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218								
	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Biasa	62,400,000	56,400,000	56,350,000	56,350,000	0	56,350,000	99.91	50,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	92,400,000	86,400,000	86,350,000	86,350,000	0	86,350,000	99.94	50,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	187,110,000	187,110,000	185,927,500	185,927,500	0	185,927,500	99.37	1,182,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : 099245 PENGADILAN NEGERI SANGGAU (03)
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Sabtu, 05 Februari
 Halaman : 2
 Prog.Id : lu_lrbstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA KRO 1049.BCA	187,110,000	187,110,000	185,927,500	185,927,500	0	185,927,500	99.37	1,182,500
QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan								
52	BELANJA BARANG								
5221	Belanja Jasa	57,600,000	57,600,000	57,600,000	57,600,000	0	57,600,000	100.00	0
522131	Belanja Jasa Konsultansi	57,600,000	57,600,000	57,600,000	57,600,000	0	57,600,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221								
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	32,000,000	32,000,000	31,959,700	31,959,700	0	31,959,700	99.87	40,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241								
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	32,000,000	32,000,000	31,959,700	31,959,700	0	31,959,700	99.87	40,300
	JUMLAH BELANJA KRO 1049.QBA	89,600,000	89,600,000	89,559,700	89,559,700	0	89,559,700	99.96	40,300
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1049	89,600,000	89,600,000	89,559,700	89,559,700	0	89,559,700	99.96	40,300
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03.04.BF	276,710,000	276,710,000	275,487,200	275,487,200	0	275,487,200	99.56	1,222,800
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03.04	276,710,000	276,710,000	275,487,200	275,487,200	0	275,487,200	99.56	1,222,800
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	276,710,000	276,710,000	275,487,200	275,487,200	0	275,487,200	99.56	1,222,800
	JUMLAH BELANJA CARA PEMBIKIHAN 0	276,710,000	276,710,000	275,487,200	275,487,200	0	275,487,200	99.56	1,222,800
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	276,710,000	276,710,000	275,487,200	275,487,200	0	275,487,200	99.56	1,222,800
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	276,710,000	276,710,000	275,487,200	275,487,200	0	275,487,200	99.56	1,222,800
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	276,710,000	276,710,000	275,487,200	275,487,200	0	275,487,200	99.56	1,222,800
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	276,710,000	276,710,000	275,487,200	275,487,200	0	275,487,200	99.56	1,222,800

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROPINSI : 1300 KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : 099245 PENGADILAN NEGERI SANGGAU (03)
 JENIS SATUAN KERJA : XX XXXXXXXXXXXX

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : 05-02-22
 Halaman : 1
 Prog.Id : lu_lrapbstkth

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TRANSAKSI KAS							
	Tidak ada data....!	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER XX	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS	0	0	0	0	0	0.00	0

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROPINSI : 1300 KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : 099245 PENGADILAN NEGERI SANGGAU (03)
 JENIS SATUAN KERJA : XX XXXXXXXXXX

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : 05-02-22
 Halaman : 2
 Prog.Id : lu_lrapbstkth

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0	0	0.00	0

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIET
 Tanggal : 05/02/22
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROPINSI : 1300 KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : 099245 PENGADILAN NEGERI SANGGAU (03)

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	16,330,200	1,288,550	15,041,650	1,167.33
JUMLAH ASET LANCAR	16,330,200	1,288,550	15,041,650	1,167.33
JUMLAH ASET	16,330,200	1,288,550	15,041,650	1,167.33
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	16,330,200	1,288,550	15,041,650	1,167.33
JUMLAH EKUITAS	16,330,200	1,288,550	15,041,650	1,167.33
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	16,330,200	1,288,550	15,041,650	1,167.33

Sanggau, 31 Desember 2021

Sekretaris



Zulkarnain, S. Kom., M. Ak..
 NIP. 198507302009041003

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROPINSI : 1300 KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : 099245 PENGADILAN NEGERI SANGGAU (03)

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	13,549,500	14,597,500	(1,048,000)	(7.17)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	13,549,500	14,597,500	(1,048,000)	(7.17)
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	13,549,500	14,597,500	(1,048,000)	(7.17)
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	0	0	0.00
Beban Persediaan	80,915,890	65,699,840	15,216,050	23.16
Beban Barang dan Jasa	67,177,600	87,559,500	(20,381,900)	(23.27)
Beban Pemeliharaan	621,300	1,104,600	(483,300)	(43.75)
Beban Perjalanan Dinas	118,309,700	57,860,000	60,449,700	104.47
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	267,024,490	212,223,940	54,800,550	25.82
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN	(253,474,990)	(197,626,440)	(55,848,550)	(28.26)

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROPINSI : 1300 KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : 099245 PENGADILAN NEGERI SANGGAU (03)

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
OPERASIONAL				
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	109,100	(109,100)	(100.00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	119,000	(119,000)	(100.00)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(9,900)	9,900	(100.00)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	(9,900)	9,900	(100.00)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(253,474,990)	(197,636,340)	(55,838,650)	(28.25)

Sanggau, 31 Desember 2021
Sekretaris

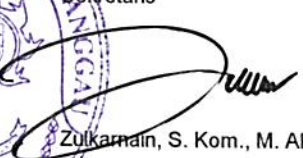

Zulkarnain, S. Kom., M. Ak..
NIP. 198507302009041003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROPINSI : 1300 KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : 099245 PENGADILAN NEGERI SANGGAU (03)

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	1,288,550	1,520,100	(231,550)	(15.23)
SURPLUS/DEFISIT - LO	(253,474,990)	(197,636,340)	(55,838,650)	28.25
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	268,516,640	197,404,790	71,111,850	36.02
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	15,041,650	(231,550)	15,273,200	(6,596.07)
EKUITAS AKHIR	16,330,200	1,288,550	15,041,650	1,167.33

Sanggau, 31 Desember 2021
Sekretaris

Zulkarnain, S. Kom., M. Ak..
NIP. 198507302009041003

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI SANGGAU

BAGIAN ANGGARAN 005.03

TAHUN 2021

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sanggau yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Peradilan Umum.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Tahunan Tahun Anggaran 2021.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sanggau Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Sanggau.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Sanggau ini adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Pengadilan Negeri Sanggau;
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2021

1. Saldo Awal Tahunan Tahun 2021

Nilai BMN per 31 Desember 2021 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebesar Rp. 16.330.200 (*satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. 16.330.200 (*satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN per 31 Desember tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 16.330.200 (*satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 1.288.550 (*satu juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 231.550 (*dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	1.288.550	15.041.650	16.330.200
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	1.288.550	15.041.650	16.330.200

3. Barang Milik Negara

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 16.330.200 (*satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah*). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
	Aset Lancar	16.330.200		0		16.330.200	
	Persediaan	16.330.200		0		16.330.200	
	Sub Jumlah	0		0		0	
	Total	16.330.200		0		16.330.200	

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau per 31 Desember 2021 per akun neraca adalah sebagai berikut :

NAMA ASET	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
Persediaan	16.330.200	16.330.200	0
Total	16.330.200	16.330.200	0

V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN

Satker Pengadilan Negeri Sanggau belum mendapat Belanja Modal atau belanja Barang yang membentuk Aset Tetap sehingga nilai BMN hanya aset lancar berupa persediaan

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Belum ada BMN yang ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau per 31 Desember 2021.

b. Pengelolaan BMN

Belum ada BMN Pengelolaan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau per 31 Desember 2021.

c. Pengelolaan BMN Idle

Belum ada Pengelolaan BMN Idle pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau per 31 Desember 2021.

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa
Pengguna Pengadilan Negeri Sanggau

Kuasa Pengguna Barang



ZULKARNAIN, S.Kom., M.Ak.

NIP.19850730 200904 1 003

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA UAKPB : 005.03.13.099245.000 PN SANGGAU 03

Tanggal : 12-01-2022
Halaman : 1
Kode Lap. : LBAPKT

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	16,330,200
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
J U M L A H		16,330,200

SANGGAU, 31 Desember 2021

Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS


ZULKARNAIN, S. Kom., M. Ak.

19850730 200904 1 003

UAPB : MAHKAMAH AGUNG
UAPPB-EI : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
UAPPB-W : KALIMANTAN BARAT

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN :2021

UAKPB : PENGADILAN NEGERI SANGGAU (03)
KODE UAKPB: 005031300099245000KD

KODE	URAIAN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	16,330,200
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
	Jumlah	16,330,200

Disetujui tanggal : 31 Desember 2021
Kuasa Pengguna Barang,
Sekretaris

Zulkarnaian, S. Kom. M. Ak.
198507302009041003

Sanggau, 31 Desember 2021
Petugas Pengelola Persediaan,
Kasubbag Umum dan Keuangan


Milawati, S.E.
197911242006042001

UAPB : MAHKAMAH AGUNG
 UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 UAPPB-W : KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN :2021

UAKPB : PENGADILAN NEGERI SANGGAU (03)
 KODE UAKPB: 005031300099245000KD

KODE	URAIAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2021
117111	BARANG KONSUMSI	
1010301001	ALAT TULIS	2,368,400
000005	- spidol permanent	96,000
000017	- Pulpen Tizo	945,600
000018	- Pulpen Kenko K1	839,400
000024	- Pulpen Standar AE7	458,400
000025	- Tip-Ex Kertas	29,000
1010301003	PENJEPIT KERTAS	452,000
000005	- Trigonal clips	452,000
1010301004	PENGHAPUS/KOREKTOR	89,000
000003	- tip x	89,000
1010301005	BUKU TULIS	771,200
000001	- Buku folio 100 lbr	397,200
000009	- buku ckspedisi isi 100 lembar	264,000
000013	- Buku Folio A3	110,000
1010301006	ORDNER DAN MAP	3,166,500
000002	- Map biasa	404,000
000003	- file gobi besar	822,500
000009	- file box	1,856,000
000011	- map pink biasa	84,000
1010301008	CUTTER (ALAT TULIS KANTOR)	7,700
000002	- isi cutter besar	7,700
1010301010	ALAT PEREKAT	283,400
000001	- lem glue	15,000
000012	- lakban bening	268,400
1010301999	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA	94,200
000010	- Case CD	84,200
000017	- Peruncing	10,000
1010302001	KERTAS HVS	6,028,900
000001	- kertas F4	4,970,000
000002	- kertas a4	1,058,900
1010304004	TINTA/TONER PRINTER	3,068,900
000011	- tinta epson hitam	110,000
000012	- Tinta Canon Botol 200 ML	346,400
000014	- Tinta Epson 003 Hitam	2,612,500

UAPB : MAHKAMAH AGUNG
 UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 UAPPB-W : KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN :2021

UAKPB : PENGADILAN NEGERI SANGGAU (03)
 KODE UAKPB: 005031300099245000KD

KODE	URAIAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2021
	Jumlah	16,330,200

Keterangan:

1. Persediaan senilai Rp. 0,- dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0,- dalam kondisi usang.

Disetujui tanggal : 31 Desember 2021
 Kuasa Pengguna Barang,
 Sekretaris



Zulkarnaian, S. Kom. M. Ak.
 198507302009041003

Sanggau, 31 Desember 2021
 Petugas Pengelola Persediaan,
 Kasubbag Umum dan Keuangan



Milawati, S.E.
 197911242006042001

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN
(OPNAME FISIK)**

Nama Satker : PENGADILAN NEGERI SANGGAU
Kode Satker : 099245
UAKPB : PENGADILAN NEGERI SANGGAU (03)

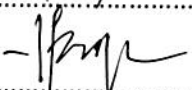
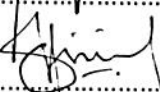
Pada hari Ini, **Jum'at** tanggal **Tiga Puluh Satu**, bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Pengadilan Negeri Sanggau, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MILAWATI,SE
NIP. : 19701124 200604 2 001
Jabatan : Ketua
2. Nama : MUSTAR
NIP. : 19651001 199303 1014
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : KHAIRIL ANWAR
NIP. : 19830110 200912 1 005
Jabatan : **Anggota**

Menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan fisik barang persediaan (Opname Fisik) Semester II Tahun 2021 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Persediaan (Stock Opname) ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Stock Opname :

- | | | |
|------------------|-----|---|
| 1. MILAWATI,SE | ttd |  |
| 2. MUSTAR | ttd |  |
| 3. KHAIRIL ANWAR | ttd |  |

Mengetahui
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Sanggau




Zulkarnain, S.Kom.,M. Ak
NIP. 19850730 200904 1 003

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : PENGADILAN NEGERI SANGGAU
 Kode Satker : 099245
 UAKPB : PENGADILAN NEGERI SANGGAU (03)

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	KUANTITAS BARANG			KONDISI	
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik	Selisih	Baik	Usang
ALAT TULIS							
1	Spidol Permanen	000005	12	12	0	12	-
2	Pulpen Tizo	000017	20	20	0	20	-
3	Pulpen Kenko K1	000018	20	20	0	20	-
4	Pulpen Standar AE7	000024	20	20	0	20	-
5	Tip Ex Kertas	000025	2	2	0	2	-
PENJEPIT KERTAS							
6	Trigonal Clip	000005	20	20	0	20	-
PENGHAPUS/KOREKTOR							
7	Tip X	000003	13	13	0	13	-
BUKU TULIS							
8	Buku Folio 100 lbr	000001	20	20	0	20	-
9	Buku Ekspedisi isi 100 lembar	000009	20	20	0	20	-
10	Buku Folio A3	000013	2	2	0	2	-
ODNER DAN MAP							
11	Map Biasa	000002	10	10	0	10	-
12	File Gobi Besar	000003	30	30	0	30	-
13	File Box	000009	100	100	0	100	-
14	Map Pink Biasa	000011	2	2	0	2	-
CUTTER (ALAT TULIS KANTOR)							
15	Isi Cutter Besar	000002	1	1	0	1	-
ALAT PEREKAT							
16	Lem Glue	000001	3	3	0	3	-
17	Lakban Bening	000012	20	20	0	20	-
ALAT TULIS KANTOR LAINNYA							
18	Case CD	000010	26	26	0	26	-
19	Peruncing	000017	2	2	0	2	-
KERTAS HVS							
20	Kertas F4	000001	80	80	0	80	-
21	KertasA4	000002	20	20	0	20	-

**REKAPITULASI MONITORING PENUTUPAN REKENING BANK PADA WILAYAH KALIMANTAN BARAT
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	TANGGAL PENUTUPAN	ALASAN PENUTUPAN
WILAYAH KALIMANTAN BARAT									
1	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	005	03	Giro	0322-01-000708-30.1	BPG: 167 PN SANGGAU	BRI Cabang Sanggau	21-04-2021	Restrukturisasi Rekening Pemerintah dari Rekening Giro ke Rekening Virtual

Sanggau, 21 Januari 2022
 Sekretaris Pengadilan Negeri Sanggau


ZULKARNAIN.S. Kom., M.Ak.
 NIP. 19850730 200904 1 003



PENGADILAN NEGERI SANGGAU
Jl. JENDERAL SUDIRMAN NO. 1/XXI TELP. (0564) 21443 – 21191
SANGGAU (78512)

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
PERIODE : SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : W17-U6 / 4207 / PL.03 / XII / 2021**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di **Pengadilan Negeri Sanggau**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Milawati, S.E.
NIP : 19791124 200604 2 001
Jabatan : Operator SIMAK
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan Negeri Sanggau untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- II. Nama : Khairil Anwar, S.H.
NIP : 19830110 200912 1 005
Jabatan : Operator SAKPA
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Negeri Sanggau, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Sanggau, Satker Dirjen Peradilan Umum (099245) dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester II Tahun Anggaran 2021 dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data :

No.	Akun Neraca	Nilai BMN Periode :		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
1	2	3	4	5=3+4
I	POSISI BMN DI NERACA	756.500	15.573.700	16.330.200
A	ASET LANCAR	756.500	15.573.700	16.330.200
1	Persediaan	756.500	15.573.700	16.330.200
B	ASET TETAP	-	-	-
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
7	Akumulasi Penusutan Aset Tetap	-	-	-
C	ASET LAINNYA	-	-	-
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-lain	-	-	-
4	Akumulasi Penusutan Aset Lainnya	-	-	-
II	BMN NON NERACA	-	-	-
A	EKSTRAKOMPTABEL	-	-	-
1	BMN Ekstrakomptabel	-	-	-
2	Akumulasi Penusutan Ekstrakomptabel	-	-	-
B	BPYBDS	-	-	-
C	BARANG HILANG	-	-	-
D	BARANG RUSAK BERAT	-	-	-
	TOTAL (I+II)	756.500	15.573.700	16.330.200

Rincian Terlampir.

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan LKK/L disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Semester II Tahun Anggaran 2021, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator SIMAK

Milawati, S.E.
NIP. 19791124 200604 2 001

Operator SAKPA

Khairil Anwar, S.H.
NIP. 19830110 200912 1 005

Sekretaris

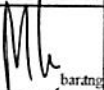
ZULKARNAIN, S. Kom., M. Ak.
NIP. 19650730 200904 1 003

**LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA**

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN


 kuangan


 barang

II. PERIODE

1 2 / 2 1

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode 0 0 5 - 0 3 - 1 3 0 0 - 0 9 9 2 4 5 - 0 0 0 - K D

2. Nama Pengadilan Negeri Sanggau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 1/XXI Telp. (0564) 21443 / 21191 Sanggau - 78512

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

NO	PERKIRAAN NERACA	SAK	SIMAK-BMN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	756.500	756.500	756.500
A	ASET LANCAR	756.500	756.500	756.500
1	Persediaan	756.500	756.500	756.500
B	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
4	Gedung dan Bangunan	0	0	0
5	Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
7	Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
8	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
9	Akum. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	0	0	0
3	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
4	Aset Lain-lain	0	0	0
5	Akum. Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
II	BMN NON NERACA	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	-	-	-
B	BPYBDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
	TOTAL (I + II)	756.500	756.500	756.500

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
(1)	(2)	(3)	TAMBAH	KURANG	(6) = (3) + (4) - (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	POSISI BMN DI NERACA	756.500	0	0	756.500
A	ASET LANCAR	756.500	0	0	756.500
1	Persediaan	756.500	0	0	756.500
B	ASET TETAP	0	0	0	0
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
3	Akum. Penyusutan	-	0	0	-
4	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
5	Akum. Penyusutan	-	0	0	-
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
7	Akum. Penyusutan	-	0	0	-
8	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
9	Akum. Penyusutan	0	0	0	0

10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
C.	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
3	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
4	Aset Lain-lain	0	0	0	0
5	Akum. Penyusutan	-	0	0	-
II	BMN NON NERACA	0	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	-	0	0	-
B	BPYBDS	0	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0	0
TOTAL (I + II)		756.500	0	0	756.500

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
A	ASET LANCAR	NIHIL		
A.1	Persediaan			
B.	ASET TETAP			
B.1	Tanah			
B.2	Peralatan dan Mesin			
B.3	Gedung dan Bangunan			
B.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
B.5	Aset Tetap Lainnya			
B.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan			
C	ASET LAINNYA			
C.1	Aset Tidak Berwujud			
C.2	Aset Lain-lain			
D	SUB JUMLAH (A+B+C)			
E	Ekstrakomptable			
F	TOTAL (D+E)			

VII. DATA TRANSAKSI BMN NON KEUANGAN

a. MUTASI TAMBAH BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	-	-	-
		-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
		-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
		-	-	-
4	Jaringan	-	-	-
		-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
		-	-	-
6	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan	-	-	-
		-	-	-
TOTAL				0

b. MUTASI KURANG BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	-	-	-
		-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
		-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-

		-	-	-
4	Jaringan	-	-	-
		-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
		-	-	-
6	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan	-	-	-
		-	-	-
TOTAL				-

c. PENYUSUTAN BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS PENYUSUTAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peralatan dan Mesin	Penyusutan Pertama Kali	-
		Penyusutan Transaksional	-
		Penyusutan Reguler	-
2	Gedung dan Bangunan	Penyusutan Pertama kali	-
		Penyusutan Transaksional	-
		Penyusutan Reguler	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Penyusutan Pertama kali	-
		Penyusutan Transaksional	-
		Penyusutan Reguler	-
4	Aset Lain-lain	Penyusutan Pertama kali	-
		Penyusutan Transaksional	-
		Penyusutan Reguler	-
TOTAL			-

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

- Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Pengelolaan BMN Pada Semester II Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 0,- (Nol

IX. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Saldo awal periode Semester II Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL.
- Tidak Terdapat Transaksi BMN selama periode semester II Tahun Anggaran 2021 karena tidak terdapat Asset BMN pda Entitas ini.



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-149899/WPB.16/KP.167/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara PENGADILAN NEGERI SANGGAU (099245) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SANGGAU, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2021.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	276,710,000	276,710,000	0
2	Belanja	275,487,200	275,487,200	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	17,618,000	17,618,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	13,549,500	13,549,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Kharly Oktaperdana
NIP.198910112010121002



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris

ZULKARNAIN, S.KOM
NIP.198507302009041003

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: PENGADILAN NEGERI SANGGAU (099245)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 276,710,000

SAI/SA-BUN : 276,710,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 17,618,000

SAI/SA-BUN : 17,618,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 275,487,200

SAI/SA-BUN : 275,487,200

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 13,549,500

SAI/SA-BUN : 13,549,500

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Kharly Oktaperdana
NIP.198910112010121002



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris

ZULKARNAIN , S.KOM
NIP.198507302009041003

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

REKAPITULASI DAFTAR REKENING PEMERINTAH PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
PER 31 DESEMBER 2021

NO.	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TNP/NON TNP	SALDO REKENING PER 30 JUNI 2021
1.	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	005	03	VIRTUAL	654440992451000	BPG 167 PN SANGGAU	BRI KC SANGGAU	KPPN S-153/ WPB.12/ KP.06/ 2021	No. 21-01-2021	TNP	Rp
2.	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	005	03	GIRO	00042.01.30.000706.7	RPL 167 PN SANGGAU UTK BIAYA PERKARA	BTN KC PONTIANAK	KPPN No. S-923/ WPB.17/ KP.03/2018	31-10-2018	TNP	Rp 5.219.365.550

Sanggau, 31 Desember 2021
Sekretaris Pengadilan Negeri Sanggau


ZULKARNAIN S. KOM. M. AK.
NIP. 19850730 200904 1 003

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
DITJEN BADAN PERADILAN UMUM (03)
PENGADILAN NEGERI SANGGAU (099245)
Rekening Induk : RKK DITJEN BADILUM O (023001004085304)
Virtual Account : 654440992451000 | BPG 167 PN SANGGAU
Periode : 01-12-2021 s/d 31-12-2021

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2021-12-01	12:14:27	3981066	Penggantian Uang Persediaan RM untuk keperluan Belanja Barang sesuai SPP Nomor 00029/Pengadilan Nege2116713010056630000001	0,00		10.533.200,00	10.533.200,00	SPAN	
2021-12-02	10:46:40	4002971	PN SANGGAU	10.533.200,00	10.533.200,00		0,00		TELLER_CARD
2021-12-07	12:43:51	4113921	Penggantian Uang Persediaan RM untuk keperluan Belanja Barang sesuai SPP Nomor 00030/Pengadilan Nege2116713010060100000001	0,00		11.978.500,00	11.978.500,00	SPAN	
2021-12-08	14:01:29	4152182	BPG 167 PN SANGGAU	11.978.500,00	11.978.500,00		0,00		TELLER_CARD
Total Mutasi					22.511.700,00	22.511.700,00			
Saldo Akhir							0,00		

DATE PRINTED : 3/01/22 9:44:48
PONTIANAK

BRANCH : 00042

Period : 1/12/21 - 31/12/21
RPL 167 PN SANGGAU UTK BIAYA PERKARA
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO 1/XOX
BERINGIN
SANGGAU 78512

000042-01-30-000706-7

Last stmt 31/12/21
Last Bal 5,219,365,550.00

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
			B/F				1,175,370,050.00 Cr
1/12/2021	1/12/2021	7788 768621120005 5335484967	0372/001		0	880,000.00	1,176,250,050.00 Cr
2/12/2021	2/12/2021	AMP Ex VA	9288/001		0	870,000.00	1,177,120,050.00 Cr
	2/12/2021	7788 768621120007 335120200005303	3885/001		0	1,310,000.00	1,178,430,050.00 Cr
3/12/2021	3/12/2021	SITI AULIATI AGUSTINA 1671094508970006	0000/002		5,000,000.00	0	1,173,430,050.00 Cr
6/12/2021	6/12/2021	7788 768621120008 340000000004035	0378/001		0	1,435,000.00	1,174,865,050.00 Cr
7/12/2021	7/12/2021	7788 768621120009 5341313435	1274/001		0	885,000.00	1,175,750,050.00 Cr
15/12/21	15/12/21	7788 768621120010 5349241357	0539/001		0	135,000.00	1,175,885,050.00 Cr
	15/12/21	7788 768621120011 5349440225	0167/001		0	135,000.00	1,176,020,050.00 Cr
17/12/21	17/12/21	SITI AULIATI AGUSTINA 1671094508970006	0000/002		10,000,000.00	0	1,166,020,050.00 Cr
23/12/21	23/12/21	panjar biaya uji materi	0000/001		0	2,700,000.00	1,168,720,050.00 Cr
	23/12/21	PANJAR BIAYA PENDAFTARAN BANDING	0000/001		0	2,200,000.00	1,170,920,050.00 Cr
28/12/21	28/12/21	210421304013184000000.00	0000/005		0	140,115,000.00	1,311,035,050.00 Cr
	28/12/21	210421304013185000000.00	0000/005		0	2,780,000.00	1,313,815,050.00 Cr
	28/12/21	210421304013186000000.00	0000/005		0	593,556,000.00	1,907,371,050.00 Cr
	28/12/21	210421304013187000000.00	0000/005		0	1,800,000.00	1,909,171,050.00 Cr
	28/12/21	210421304013188000000.00	0000/005		0	3,308,242,000.00	5,217,413,050.00 Cr
	28/12/21	210421304013189000000.00	0000/005		0	1,800,000.00	5,219,213,050.00 Cr
29/12/21	29/12/21	7788 768621120012 5363868032	6720/001		0	135,000.00	5,219,348,050.00 Cr
31/12/21	31/12/21	7788 768621120013 365100000290666	4584/001		0	17,500.00	5,219,365,550.00 Cr

**REKAPITULASI MONITORING PENUTUPAN REKENING BANK PADA WILAYAH KALIMANTAN BARAT
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	TANGGAL PENUTUPAN	ALASAN PENUTUPAN
	WILAYAH KALIMANTAN BARAT								
1	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	005	03	Giro	0322-01-000708-30.1	BPG: 167 PN SANGGAU	BRI Cabang Sanggau	21-04-2021	Restrukturisasi Rekening Pemerintah dari Rekening Giro ke Rekening Virtual

Sanggau, 31 Desember 2021
Sekretaris Pengadilan Negeri Sanggau



ZULKARNAIN, S. Kom., M.Ak.
NIP. 19850730 200904 1 003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LT. 3
JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 3449230 (20 SALURAN) PES. 5405, 3840516 FAKSMILE: 3840516
SITUS : www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-761 /PB.3/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pemindahbukuan dan Penutupan Rekening Lingkup
Ditjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

21 April 2021

- Yth. 1. Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI
2. Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Sehubungan dengan tahapan Restrukturisasi Rekening Pemerintah sesuai PMK 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga dan surat **Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Umum** nomor **349/DJU.1/KU.01/4/2021** tanggal 19 April 2021 hal Permohonan Cut-off dan Pemindahbukuan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai surat tersebut, disampaikan bahwa kelengkapan rekening virtual berupa kartu debit dan *user access CMS* dan *dashboard* telah diterima oleh satker di lingkungan Ditjen Badan Peradilan Umum.
2. Waktu *cut off* perpindahan saldo dari rekening giro ke rekening virtual dilaksanakan pada hari **Kamis tanggal 22 April 2021**.
3. Memperhatikan hal diatas serta untuk kelancaran pelaksanaan *cut-off* maka perlu diatur langkah-langkah sebagai berikut:

Pihak Bank Rakyat Indonesia :

- a. Melakukan pemindahan saldo secara terpusat oleh kantor pusat bank sebagaimana dimaksud pada angka 2 berdasarkan **data sebagaimana terlampir**;
- b. Melakukan penutupan rekening giro lama mulai tanggal 22 April 2021;
- c. Seluruh transaksi pada satker lingkup Ditjen Badan Peradilan Umum selaku pihak terkait restrukturisasi rekening mulai tanggal 23 April 2021 harus menggunakan rekening virtual;
- d. Melakukan penarikan cek/bilyet giro mulai tanggal 23 April 2021;
- e. Kantor pusat bank berkoordinasi dengan kantor cabang dan Ditjen Badan Peradilan Umum untuk memastikan kelancaran transisi rekening giro ke rekening virtual;
- f. Menyampaikan Laporan Penutupan dan Pemindahbukuan Rekening sesuai dengan format yang terdapat pada surat Direktur PKN Nomor S-348/PB.3/2020 tanggal 3 Juli 2020 paling lambat 10 hari kerja setelah dilakukan *cut-off*.

Pihak Ditjen Badan Peradilan Umum :

- g. Menginformasikan kepada **satker Ditjen Badan Peradilan Umum** agar:
 - 1) Melakukan pembuatan file data *supplier* pada aplikasi SAS/SAKTI dan pendaftaran *supplier* bendahara pengeluaran pada KPPN Mitra Kerja Satker mulai 22 April 2021;
 - 2) Menyampaikan/menginformasikan surat cut-off sebagaimana dimaksud kepada KPPN Mitra Kerja Satker terkait pendaftaran *supplier* bendahara pengeluaran pada SPAN/SAKTI.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya mempedomani langkah-langkah diatas guna kelancaran proses pelaksanaan pemindahbukuan dan penutupan rekening.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur,

Didyk Choirel

Tembusan :
Kepala KPPN seluruh Indonesia

LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN CUT OFF DAN PEMINDAHANBUKUAN
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI
PADA PT BANK BAKYAT INDONESIA Tbk. PERSERO

No	KODE SATKER	Nama Satker	Nomor Rekening	Existing	Nomor VA	Rekening Virtual	Keterangan	Kartu Debit	Akses CMS (email)	Kelengkapan Rekening	Dashboard (email)
1	099148	STKR099148 PN NGANJUK	005601002052304	BPG 034 PN KAB. NGANJUK	654440991481000	BPG 034 PN KAB. NGANJUK	BPG	✓	✓	✓	✓
2	099154	STKR099154 PN PROBOLINGGO	007301000878305	BPG 035 PERADILAN UMUM	654440991541000	BPG 035 PERADILAN UMUM	BPG	✓	✓	✓	✓
3	099252	STKR099252 PN SAMBIT	016301000968309	BPG 044 PN SAMBIT 03	654440992521000	BPG 044 PN SAMBIT 03	BPG	✓	✓	✓	✓
4	099194	STKR099194 PN KABANJAHE	014401000559302	BPG 119 PN KABANJAHE	654450991941000	BPG 119 PN KABANJAHE	BPG	✓	✓	✓	✓
5	099128	STKR099128 PN YOGYAKARTA	024501000829301	BPG 030 PN YOGYAKARTA QQ 03	654440991281000	BPG 030 PN YOGYAKARTA QQ 03	BPG	✓	✓	✓	✓
6	099596	STKR099596 PN SELAYAR	025701000570305	BPG 155 PN SELAYAR (099596)	654440995961000	BPG 155 PN SELAYAR (099596)	BPG	✓	✓	✓	✓
7	099550	STKR099550 PN WATANSOPPENG	011801000342304	BPG 055 PN WATANSOPPENG	654440995501000	BPG 055 PN WATANSOPPENG	BPG	✓	✓	✓	✓
8	099241	STKR099241 PN SINTANG	030401000595302	BPG 079 PN SINTANG	654440992411000	BPG 079 PN SINTANG	BPG	✓	✓	✓	✓
9	099233	STKR099233 PN SEKAYU	016401000411306	BPG 160 PN SEKAYU 03	654440992331000	BPG 160 PN SEKAYU 03	BPG	✓	✓	✓	✓
10	099255	STKR099255 PN KANDANGAN	003101000249302	BPG 110 PN KANDANGAN QQ 03	654440992551000	BPG 110 PN KANDANGAN QQ 03	BPG	✓	✓	✓	✓
11	099115	STKR099115 PN SURAKARTA	033401000551307	BPG 028 PN SURAKARTA 03	654440991151000	BPG 028 PN SURAKARTA 03	BPG	✓	✓	✓	✓
12	099229	STKR099229 PN LUBUK LINGAU	012901001252305	BPG 070 PN LUBUKLINGGAU 03	654450992291000	BPG 070 PN LUBUKLINGGAU 03	BPG	✓	✓	✓	✓
13	099226	STKR099226 PN PALEMBANG	005901001840303	BPG 014 PN PALEMBANG 02	654440992261000	BPG 014 PN PALEMBANG 02	BPG	✓	✓	✓	✓
14	099079	STKR099079 PN BEKASI	013901001537300	BPG 171 PN BEKASI	654440990791000	BPG 171 PN BEKASI	BPG	✓	✓	✓	✓
15	099140	STKR099140 PN MOJOKERTO	005501000984302	BPG 098 PN MOJOKERTO 099140	654450991401000	BPG 098 PN MOJOKERTO 099140	BPG	✓	✓	✓	✓
16	099152	STKR099152 PN MALANG	005101001547301	BPG 032 PN MALANG	654440991521000	BPG 032 PN MALANG	BPG	✓	✓	✓	✓
17	099994	STKR099994 PN MAUMERE	011901000869300	BPG 040 PN MAUMERE	654440999941000	BPG 040 PN MAUMERE	BPG	✓	✓	✓	✓
18	099601	STKR099601 PN PALOPO	018701000974302	BPG 058 PN PALOPO	654440996011000	BPG 058 PN PALOPO	BPG	✓	✓	✓	✓
19	099083	STKR099083 PN SUKABUMI	009201000701305	BPG 128 PN SUKABUMI 099083	654440990831000	BPG 128 PN SUKABUMI 099083	BPG	✓	✓	✓	✓
20	099246	STKR099246 PN RANTAU	021001000557307	BPG 110 PN (BADILUM) RANTAU	654440992461000	BPG 110 PN (BADILUM) RANTAU	BPG	✓	✓	✓	✓
21	099107	STKR099107 PN BATANG	15601000435305	BPG 072 PN BATANG 099107	654440991071000	BPG 072 PN BATANG 099107	BPG	✓	✓	✓	✓
22	099990	STKR099990 PN ENDE	002401001126302	Bpg 040 PN Ende 03	654440999901000	Bpg 040 PN Ende 03	BPG	✓	✓	✓	✓
23	099712	STKR099712 PN TERNATE	010301001100304	BPG 062 PN TERNATE 03	654440997121000	BPG 062 PN TERNATE 03	BPG	✓	✓	✓	✓
24	099113	STKR099113 PN PURWOKERTO	007701000630305	BPG : 029 PN PURWOKERTO	654440991131000	BPG : 029 PN PURWOKERTO	BPG	✓	✓	✓	✓
25	099111	STKR099111 PN KEBUMEN	0032010004040300	BPG 027 PN KEBUMEN 03	654440991111000	BPG 027 PN KEBUMEN 03	BPG	✓	✓	✓	✓
26	099284	STKR099284 PT PADANG	005801001464307	BPG 010 PT DIPA BADILUM	654440992041000	BPG 010 PT DIPA BADILUM	BPG	✓	✓	✓	✓
27	099397	STKR099397 PN LUWUK	016701000437304	BPG 053 PN LUWUK 03	654440993971000	BPG 053 PN LUWUK 03	BPG	✓	✓	✓	✓
28	099013	STKR099013 PN CIAMIS	010401000575306	BPG 025 PN CIAMIS	654440990131000	BPG 025 PN CIAMIS	BPG	✓	✓	✓	✓
29	099529	STKR099529 PN PINRANG	021901000643304	BPG 057 PN PINRANG (03)	654440995291000	BPG 057 PN PINRANG (03)	BPG	✓	✓	✓	✓
30	099215	STKR099215 PN BENGKALIS	018901000328305	BPG 120 PN BENGKALIS	654440992151000	BPG 120 PN BENGKALIS	BPG	✓	✓	✓	✓
31	099164	STKR099164 PN MAGETAN	004901000751304	BPG : 033 PN MAGETAN (03)	654440991641000	BPG : 033 PN MAGETAN (03)	BPG	✓	✓	✓	✓
32	099101	STKR099101 PN PURWODADI	007601002191303	BPG 163 PN PURWODADI 03	654440991011000	BPG 163 PN PURWODADI 03	BPG	✓	✓	✓	✓
33	099208	STKR099208 PN SOLOK	009101001469301	BPG 037 PN SOLOK (BADILUM)	654440992081000	BPG 037 PN SOLOK (BADILUM)	BPG	✓	✓	✓	✓
34	099821	STKR099821 PN TABANAN	012401000828307	BPG 037 PN TABANAN (03)	654440998211000	BPG 037 PN TABANAN (03)	BPG	✓	✓	✓	✓
35	099088	STKR099088 PN PEMALANG	006901000676306	BPG 118 PN PEMALANG-099088	654440990881000	BPG 118 PN PEMALANG-099088	BPG	✓	✓	✓	✓
36	099121	STKR099121 PN BOYOLALI	017301000471305	BPG 148 PN BOYOLALI	654440991211000	BPG 148 PN BOYOLALI	BPG	✓	✓	✓	✓
37	099125	STKR099125 PN BANYUMAS	007701000625300	BPG : 029 PN BANYUMAS	654440991251000	BPG : 029 PN BANYUMAS	BPG	✓	✓	✓	✓
38	099239	STKR099239 PN PONTIANAK	007101001315302	BPG 042 PN PONTIANAK	654440992391000	BPG 042 PN PONTIANAK	BPG	✓	✓	✓	✓
39	099077	STKR099077 PN TANGERANG	012001001566300	BPG 127 PN TANGERANG	654440990771000	BPG 127 PN TANGERANG	BPG	✓	✓	✓	✓
40	099136	STKR099136 PN TUBAN	010901000619304	BPG 166 PN TUBAN 03	654440991361000	BPG 166 PN TUBAN 03	BPG	✓	✓	✓	✓
41	099097	STKR099097 PN BREBES	001401000957309	BPG 118 PN BREBES	654440990971000	BPG 118 PN BREBES	BPG	✓	✓	✓	✓
42	099258	STKR099258 PN MARTAPURA	002401000551304	BPG 045 PN MARTAPURA	654440992581000	BPG 045 PN MARTAPURA	BPG	✓	✓	✓	✓
43	099240	STKR099240 PN SINGKAWANG	008601000470308	BPG 093 PN SINGKAWANG 099240	654440992401000	BPG 093 PN SINGKAWANG 099240	BPG	✓	✓	✓	✓
44	099863	STKR099863 PN MATARAM	005201001032300	BPG 038 PN MATARAM	654440998631000	BPG 038 PN MATARAM	BPG	✓	✓	✓	✓
45	099643	STKR099643 PN POLEWALI	025601001062309	BPG 059 099643 PN PLW	654450996431000	BPG 059 099643 PN PLW	BPG	✓	✓	✓	✓
46	099207	STKR099207 PN BATUSANGKAR	015601000344305	BPG 011 PN BATUSANGKAR 03	654440992071000	BPG 011 PN BATUSANGKAR 03	BPG	✓	✓	✓	✓
47	099472	STKR099472 PN MAROS	022401000432308	BPG 136 PN MAROS (099472)	654440994721000	BPG 136 PN MAROS (099472)	BPG	✓	✓	✓	✓
48	099225	STKR099225 PT PALEMBANG	034201000617302	BPG 014 PT PALEMBANG 03	654450992251000	BPG 014 PT PALEMBANG 03	BPG	✓	✓	✓	✓
49	099334	STKR099334 PN KOTAMUBAGO	003601000600304	BPG 158 PENGADILAN NEGERI KOTAN	654440993341000	BPG 158 PENGADILAN NEGERI KOTAN	BPG	✓	✓	✓	✓

51	099445	STKR099245 PN SANGGAU	0130010000/05302	BPG 126 PN Metro (03)	BPG 126 PN Metro (03)	✓
52	099149	STKR099149 PN TOBELO	032201000708301	BPG: 167 PN SANGGAU	BPG	✓
53	402416	STKR402016 PN TELUK KUANTAN	111401000106301	BPG 112 PN TOBELO QQ DJBPU	BPG	✓
54	477453	STKR477363 PN PASAMAN BARAT	063801000592302	BPG 092 PN TELUK KUANTAN 16	BPG	✓
55	400334	STKR400334 PN LUBUK BASUNG	0615601000179301	BPG 091 PN PASBAR (477353)	BPG	✓
56	477119	STKR477219 PN TILAMUTA	065701000089305	BPG 011 PN LUBUK BASUNG	BPG	✓
57	400371	STKR400371 PN SIMALUNGUN	515101000058302	BPG: 180. PN TILAMUTA	BPG	✓
58	663427	STKR663027 PN MENGGALA	0113010000642302	BPG 005 PN SIMALUNGUN	BPG	✓
59	400581	STKR400581 PN KAB. KEDIRI	0605010000146305	BPG 116 PN MENGGALA 03	BPG	✓
60	670228	STKR670228 PN SAMBAS	0033301002795307	BPG 034 PN KAB. KEDIRI 03	BPG	✓
61	673010	STKR673010 PN TALS	1168010000181302	BPG 093 PN SAMBAS (670228)	BPG	✓
62	673014	STKR673014 PN MALILI	355101000073300	BPG 121 PN TALS DJBPU	BPG	✓
63	402024	STKR402024 PN KUALA KURUN	499701000042304	BPG 058 PN MALILI	BPG	✓
64	670185	STKR670185 PN MARISA	1053010000431308	BPG 043 PN KUALA KURUN 402024	BPG	✓
65	403433	STKR403433 PN DATARAN HUNIMQ	0648010000147305	BPG: 180. PN MARISA	BPG	✓
66	400359	STKR400359 PT PALANGKARAYA	4973010000335307	BPG 173 PN DATARAN HUNMOA 4034	BPG	✓
67	402034	STKR402034 PN BELOPA	0243010001218301	BPG 043 PT PALANGKA RAYA 400359	BPG	✓
68	400164	STKR400164 PN KALABAH	2148010000465309	BPG 058 PN BELOPA 402034	BPG	✓
69	402038	STKR402038 PN NAMLEA	0278010000595301	BPG 039 BENDAHARA PN KALABAH	BPG	✓
70	662091	STKR662091 PN PASIR PENGARAI	214401000436306	BPG 061 PN NAMLEA (03)	BPG	✓
71	477402	STKR477402 PN TANJUNG JABUNG	109901000054306	BPG 008 PN PASIR PENGARAIAN	BPG	✓
72	672091	STKR672091 PN PARIGI	0179010000620305	BPG 143 PN TJT 477400	BPG	✓
73	664540	STKR664540 PT GORONTALO	3853010000302305	BPG 051 PENGADILAN NEGERI PARIG	BPG	✓
			002701001280302	BPG 050 PT GORONTALO	BPG	✓

<<<<<<<

DATE PRINTED: 23/04/21 9:12:25

PC Sanggau

Branch: 00322

(Period : 1/04/21 - 23/04/21)

72/04/21 001230P Page 1

02300322-01-000708-30-1 Last Stmt :
Last Bal :
SPR: 167 PK SANGGAU
JL JEND SUKISTAN RD 1
KIL BETINGIN KEC KAPURAS
SANGGAU KAB.
KAPURAS SANGGAU KAB.

00

TRANSDATE
TRANSDATE
DESCRIPTION

TRANS
DATE
DEBIT

DEBIT

CREDIT

LEDGER BALANCE

USER ID

6/04/21 6/04/21 SPAR : 211271301201356000001
9/04/21 9/04/21 CA Cash Withdrawal

0000/540 00
6180/002 01476541 9,369,500.00

9,369,500.00 00

9,369,500.00 00

SPR410 0322053

End of Report

FOTOKOPI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGEMBARAN NEGERI SANGGAU
SEKRETARIS,



S. Kom. M. Ak
NIP. 199807302009041003



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KANTOR CABANG SANGGAU E0322

Jalan Jend. Sudirman No.59 Tlp.(0564) 21123 Facs. 21215 Sanggau

Nomor : B. 552-XV/KC/OPS/04/2021
Lampiran : -
Perihal : Penutupan Rekening Giro.

Sanggau, 23 April 2021

Kepada Yth,
Kepala Kantor
Pengadilan Negeri Sanggau,
Up: Bagian Bendahara,
Jl Jendral Sudirman No.1

Di

Sanggau.

Surat Pengadilan Negeri Sanggau No W17-U6/146D/KU.1/4/2021 . Kantor Wilayah Kalimantan Barat Mengenai Laporan Penutupan Rekening BPG:167 PN SANGGAU.

Menunjuk Surat tersebut diatas dengan ini kami sampaikan bahwa:

NO	NO REKENING	NAMA REKENING	KETERANGAN
1.	0322.01.000.708.301	BPG:167 PN SANGGAU.	Sudah ditutup by system

Rekening tersebut diatas telah ditutup dan tidak dapat dipergunakan kembali.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SANGGAU


Eko Hary Wijayanto
Pemimpin Cabang

Tindasan

**REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2021**
(dalam satuan rupiah)

K/L : (005) Mahkamah Agung
Provinsi/DI : (1300) Kalimantan Barat
Satuan Kerja : (099245) Pengadilan Negeri Sanggau

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					Kas di Brankas
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	
1	Januari	Biaya Perkara	24.040.400,00	10.785.000,00	11.103.400,00	23.722.000,00	16.896.500,00	6.825.500,00
		Biaya Eksekusi	2.836.000,00	0,00	70.000,00	2.766.000,00	2.766.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	715.037.000,00	0,00	0,00	715.037.000,00	715.037.000,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	741.913.400,00	10.785.000,00	11.173.400,00	741.525.000,00	734.699.500,00	6.825.500,00
2	Februari	Biaya Perkara	23.722.000,00	23.873.000,00	15.157.500,00	32.437.500,00	25.769.500,00	6.668.000,00
		Biaya Eksekusi	2.766.000,00	0,00	0,00	2.766.000,00	2.766.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	715.037.000,00	0,00	0,00	715.037.000,00	715.037.000,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	741.525.000,00	23.873.000,00	15.157.500,00	750.240.500,00	743.572.500,00	6.668.000,00
3	Maret	Biaya Perkara	32.437.500,00	4.705.000,00	15.706.500,00	21.436.000,00	13.474.500,00	7.961.500,00
		Biaya Eksekusi	2.766.000,00	0,00	0,00	2.766.000,00	2.766.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	715.037.000,00	0,00	0,00	715.037.000,00	715.037.000,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	750.240.500,00	4.705.000,00	15.706.500,00	739.239.000,00	731.277.500,00	7.961.500,00
4	April	Biaya Perkara	21.436.000,00	3.130.000,00	7.645.000,00	16.921.000,00	4.894.500,00	12.026.500,00
		Biaya Eksekusi	2.766.000,00	1.000.000,00	840.000,00	2.926.000,00	2.926.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	715.037.000,00	5.000.000,00	2.450.000,00	717.587.000,00	717.587.000,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	739.239.000,00	9.130.000,00	10.935.000,00	737.434.000,00	725.407.500,00	12.026.500,00
		Biaya Perkara	16.921.000,00	9.987.500,00	5.263.000,00	21.645.500,00	12.882.000,00	8.763.500,00

**REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2021**
(dalam satuan rupiah)

K/L : (005) Mahkamah Agung
Provinsi/DI : (1300) Kalimantan Barat
Satuan Kerja : (099245) Pengadilan Negeri Sanggau

			Keadaan Keuangan					
5	Mei	Biaya Eksekusi	2.926.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.926.000,00	2.926.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	717.587.000,00	0,00	0,00	717.587.000,00	717.587.000,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	737.434.000,00	12.987.500,00	8.263.000,00	742.158.500,00	733.395.000,00	8.763.500,00
6	Juni	Biaya Perkara	21.645.500,00	20.161.500,00	14.203.500,00	27.603.500,00	24.043.500,00	3.560.000,00
		Biaya Eksekusi	2.926.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.926.000,00	2.926.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	717.587.000,00	0,00	0,00	717.587.000,00	717.587.000,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	742.158.500,00	23.161.500,00	17.203.500,00	748.116.500,00	744.556.500,00	3.560.000,00
7	Juli	Biaya Perkara	27.603.500,00	16.965.000,00	12.294.500,00	32.274.000,00	28.947.500,00	3.326.500,00
		Biaya Eksekusi	2.926.000,00	4.500.000,00	3.428.000,00	3.998.000,00	3.998.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	717.587.000,00	292.367.672,00	47.511.000,00	962.443.672,00	962.443.672,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	748.116.500,00	313.832.672,00	63.233.500,00	998.715.672,00	995.389.172,00	3.326.500,00
8	Agustus	Biaya Perkara	32.274.000,00	5.475.000,00	14.579.000,00	23.170.000,00	20.841.500,00	2.328.500,00
		Biaya Eksekusi	3.998.000,00	0,00	200.000,00	3.798.000,00	3.798.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	962.443.672,00	190.511.878,00	5.219.000,00	1.147.736.550,00	1.147.736.550,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	998.715.672,00	195.986.878,00	19.998.000,00	1.174.704.550,00	1.172.376.050,00	2.328.500,00
9	September	Biaya Perkara	23.170.000,00	13.540.000,00	14.906.500,00	21.803.500,00	15.319.000,00	6.484.500,00
		Biaya Eksekusi	3.798.000,00	0,00	937.500,00	2.860.500,00	2.860.500,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	1.147.736.550,00	0,00	0,00	1.147.736.550,00	1.147.736.550,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2021
(dalam satuan rupiah)**

K/L : (005) Mahkamah Agung
Provinsi/DI : (1300) Kalimantan Barat
Satuan Kerja : (099245) Pengadilan Negeri Sanggau

		Keadaan Keuangan					
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.174.704.550,00	13.540.000,00	15.844.000,00	1.172.400.550,00	1.165.916.050,00
10	Oktober	Biaya Perkara	21.803.500,00	12.260.000,00	6.846.000,00	27.217.500,00	20.579.000,00
		Biaya Eksekusi	2.860.500,00	0,00	0,00	2.860.500,00	2.860.500,00
		Biaya Konsinyasi	1.147.736.550,00	0,00	0,00	1.147.736.550,00	1.147.736.550,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.172.400.550,00	12.260.000,00	6.846.000,00	1.177.814.550,00	1.171.176.050,00
11	November	Biaya Perkara	27.217.500,00	11.244.000,00	9.382.000,00	29.079.500,00	21.823.000,00
		Biaya Eksekusi	2.860.500,00	2.950.000,00	0,00	5.810.500,00	5.810.500,00
		Biaya Konsinyasi	1.147.736.550,00	0,00	0,00	1.147.736.550,00	1.147.736.550,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.177.814.550,00	14.194.000,00	9.382.000,00	1.182.626.550,00	1.175.370.050,00
12	Desember	Biaya Perkara	29.079.500,00	10.702.500,00	15.104.500,00	24.677.500,00	23.121.500,00
		Biaya Eksekusi	5.810.500,00	0,00	940.000,00	4.870.500,00	4.870.500,00
		Biaya Konsinyasi	1.147.736.550,00	4.048.293.000,00	4.656.000,00	5.191.373.550,00	5.191.373.550,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.182.626.550,00	4.058.995.500,00	20.700.500,00	5.220.921.550,00	5.219.365.550,00

*) Khusus Pengadilan Negeri

Sanggau, 31 Desember 2021
Sekretaris Pengadilan Negeri Sanggau

ZULKARNAIN, S. Kom., M. Ak.
NIP. 19850730 200904 1 003

